

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGENDALIKAN ANGKA KEMISKINAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTAENG

Fitri Novianti ^{1*}, Adnan Ma'ruf ², Arni ³

¹Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Correspondence: noviantifitri349@gmail.com

Abstract : *Poverty is an economic phenomenon that has become a serious issue that must be addressed immediately. This phenomenon is a serious problem not only in Indonesia but also worldwide. The aim of this research is to identify the strategies used by the government of Bantaeng Regency to control poverty rates. This study employs a qualitative approach using observation, interviews, and documentation methods. The research findings reveal that the poverty rate in Bantaeng Regency was initially at 8%, then increased to 9% after the Covid-19 pandemic before dropping back to 8%, with fluctuations that were not too significant. According to the Social Affairs Office of Bantaeng Regency, the factors contributing to poverty include the Covid-19 outbreak, education level, low income, lack of skills, stagnant mindset, inadequate healthcare, and economic uncertainty. The government's strategy for controlling poverty in Bantaeng Regency includes social assistance programs and improving human resource quality through education. Social assistance helps the economic development of the community by ensuring their basic needs are met, and the aid provided can serve as capital for starting businesses. Meanwhile, enhancing human resource quality through education helps improve people's skills in various fields. Based on the data obtained, the implementation of these strategies has successfully controlled the poverty rate in Bantaeng Regency.*

Keywords: *Strategy, Social Affairs Department, Bantaeng, Poverty.*

Abstrak: Kemiskinan merupakan sebuah fenomena ekonomi yang menjadi sebuah masalah serius yang harus segera diatasi. Fenomena ini merupakan masalah serius tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui strategi yang digunakan pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mengendalikan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa kondisi kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantaeng berada pada persentase 8% kemudian naik pasca Covid-19 menjadi 9% kemudian turun kembali ke angka 8% dengan naik turun yang tidak terlalu signifikan, faktor penyebab kemiskinan menurut Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng diantaranya wabah covid-19, tingkat pendidikan, rendahnya pendapatan, tidak memiliki keterampilan, pola pikir yang tidak maju, kesehatan yang kurang terjamin serta ketidakpastian ekonomi. Adapun strategi pemerintah dalam mengendalikan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng yakni bantuan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek pendidikan. Bantuan sosial bermanfaat untuk perkembangan ekonomi masyarakat sebab terjaminnya kebutuhan dasar mereka dan bantuan yang diberikan dapat menjadi modal mereka dalam membuka bisnis sedangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dapat meningkatkan keterampilan masyarakatnya dalam berbagai bidang. Berdasarkan data yang diperoleh penggunaan strategi ini berhasil mengendalikan angka kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.

Kata kunci: Strategi, Dinas Sosial, Bantaeng, Kemiskinan.

1. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak negara di dunia dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, tak terkecuali Indonesia. Keseriusan dan komitmen negara-negara tersebut ditunjukkan dengan masuknya pengurangan kemiskinan sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya satu tujuan yaitu tanpa kemiskinan.

Menurut (Pratama, 2023) Kemiskinan adalah ketidak berhasilannya fungsi beberapa kemampuan dasar atau dengan perkataan lain seseorang dikatakan miskin jika mengalami kesusahan untuk mencapai/mendapatkan kemampuan dasar ini. Sen menyatakan bahwa kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah low income, tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan capability handicap. Sambungnya, kemiskinan merupakan salah satu hal yang masih perlu diperhatikan di Indonesia.

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu faktor yang sering kali dianggap serius, menurut (Fery Priawan & Ichsan Iqbal, 2024) kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu memilih dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya, dan juga tidak mampu menggunakan energi mental atau fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan masih menjadi permasalahan klasik yang belum tuntas di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius sejak era pasca kemerdekaan hingga saat ini.

Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar basic needs approach. Menurut BPS kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dengan pendekatan pengeluaran. Menurut (Mulia & Putri, 2022) penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan juga menjadi prioritas nasional pada setiap rencana kerja pemerintah setidaknya dalam 4 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang penting dan perlu diperhatikan di berbagai belahan Negara, meskipun dalam hal ini mungkin ada dari beberapa Negara yang tingkat kemiskinannya termasuk rendah. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam penjelasannya kata fakir ialah orang yang tidak mampu untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan dasarnya namun dalam usahanya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sehubung dengan itu Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan mengenai penanggulangan serta solusi bagi penduduk rakyat miskin, hal tersebut diatur didalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir miskin.

Penanggulangan mengenai kemiskinan dilatar belakangi tentang adanya informasi bahwa masalah tersebut ialah masalah yang memiliki tingkat kesulitan yang termasuk sulit dalam mengatasinya, yang memiliki keterkaitan atau hubungan terhadap beberapa aspek di dalamnya dari sosial, ekonomi, budaya dan lainnya (Pratiwi et al., 2022). Secara umum tentang masalah ini yang ada harus segera dituntaskan, dalam upaya penanggulangan masalah tersebut memiliki berbagai macam strategi dalam mengurangi dan menekan angka kenaikannya.

Pembengkakan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan lebih dari setengah nya adalah pedesaan. Namun, beda dengan perkotaan yang dimana justru mengalami penurunan baik jumlah juga persentase masyarakat miskinnya, daerah pedesaan malah mengalami kenaikan total persentase masyarakat miskin yang berakibat proporsi masyarakat miskin dalam desa terlihat nampak semakin tinggi yang besar secara implisit fakta ini menjelaskan ialah masyarakat miskin di daerah tersebut kurang memiliki manfaat dalam kenaikan tingkat ekonomi dalam pencapaian provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2023 mencapai 9,36%, atau sekitar 25,90 juta jiwa. Angka ini memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun awal pandemi COVID-19, namun tetap menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan belum dapat diatasi secara tuntas.

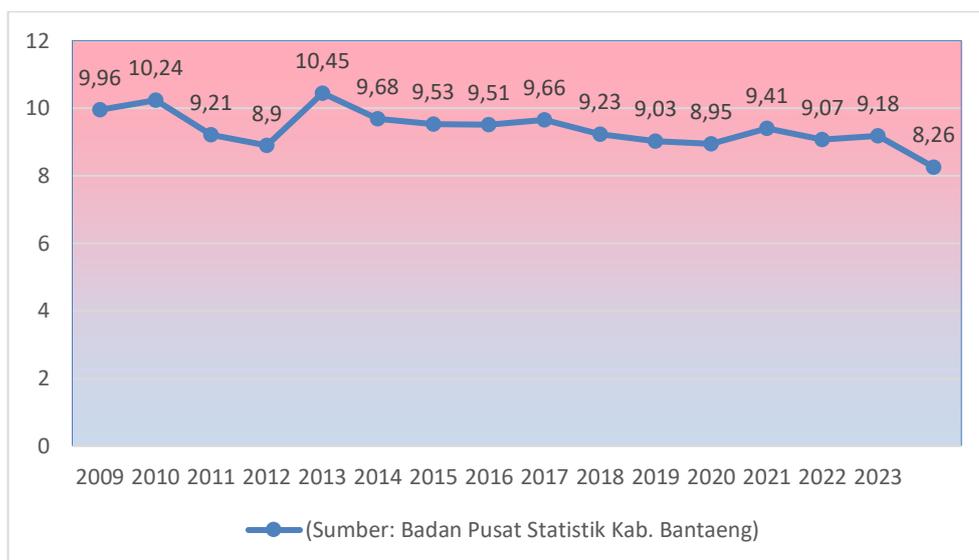
Tabel. 1. Data Kemiskinan BPS Sulawesi Selatan 2020–2024

No	Wilayah/Kab	Persentase Kemiskinan di Sulawesi Selatan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Makassar	4,54	4,82	4,58	5,07	4,97
2	Sidrap	5,05	5,04	5,11	5,14	5,02
3	Pare-Pare	5,44	5,4	5,41	5,34	5,27
4	Wajo	6,95	6,46	6,57	6,73	6,47
5	Luwu Timur	6,85	6,94	6,81	6,93	6,55
6	Bulukumba	7,1	7,43	7,39	7,22	6,71
7	Gowa	7,38	7,54	7,36	7,42	6,85
8	Soppeng	7,59	7,53	7,49	7,48	6,90
9	Palopo	7,85	8,14	7,78	7,69	7,35
10	Takalar	8,44	8,25	8,25	8,29	7,75
11	Barru	8,26	8,68	8,4	8,46	8,31
12	Pinrang	8,86	8,81	8,79	8,9	8,55
13	Sinjai	9	8,84	8,8	8,55	7,82
14	Bantaeng	8,95	9,41	9,07	9,18	8,26
15	Maros	9,74	9,57	9,43	9,65	9,32
16	Bone	10,68	10,52	10,58	10,53	9,58
17	Toraja Utara	12,01	11,99	11,65	12,12	10,73
18	Tana Toraja	12,1	12,27	12,18	12,48	10,79
19	Kepulauan Selayar	12,48	12,45	12,24	12,27	10,79
20	Enrekang	12,17	12,47	12,39	12,69	11,25
21	Luwu	12,65	12,53	12,49	12,71	11,70
22	Luwu Utara	13,41	13,59	13,22	12,66	11,24
23	Jeneponto	14,58	14,28	13,73	13,06	11,82

(Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Sosial Ekonomi Nasional/BPS Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey)

Di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bantaeng, angka kemiskinan tercatat berada pada kisaran 8,26% pada tahun 2024, sebuah penurunan dari puncaknya di tahun 2021 yang sempat mencapai 9,41%. Meskipun demikian, fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi yang berkelanjutan dan terarah

Menurut data Badan Pusat Statistik Kab. Bantaeng selama 15 tahun terakhir masih tergolong pada tingkat kemiskinan terkendali.



Gambar. 1. Grafik Persentase Kemiskinan Kab. Bantaeng 2009–2024

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik dan berbagai literatur daring, persentase kemiskinan di Kabupaten Bantaeng yang stabil pada kisaran 8–10% selama 15 tahun (2009–2024) menunjukkan keberhasilan implementasi berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah. Kebijakan ini mencakup beragam inisiatif, seperti penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, terutama selama masa pandemi COVID-19, yang memungkinkan pemulihan cepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan..

Jika diperhatikan pada grafik di atas, persentase kemiskinan di Kab. Bantaeng mengalami naik turun disebabkan oleh beberapa hal. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara di Dinas Sosial Kab.Bantaeng tanggal 13 Desember 2024, persentase kemiskinan naik turun diakibatkan adanya kenaikan harga BBM dan Sembako, hasil pertanian dan tangkapan ikan yang mengalami penurunan akibat cuaca buruk serta daya beli masyarakat menurun ditambah pandemi COVID-19 yang melanda dari tahun 2020–2023 membuat perekonomian masyarakat semakin menurun.

Dengan adanya pandemi ini, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Menurut (Salsabila et al., 2024) Bantuan

Sosial (bansos) merupakan program pemerintah yang diatur secara langsung dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial tercantum pada pasal 1 ayat 1 bahwa Bantuan Sosial merupakan “bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial”. Sehingga program Bantuan Sosial ini bertujuan secara langsung untuk memberikan bantuan pada kelompok masyarakat tertentu seperti dalam kondisi memiliki resiko sosial guna mempermudah perekonomiannya atau mengembangkan potensi yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut dengan diberikan Bantuan Sosial berupa uang tunai maupun berupa bantuan non tunai.

Pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat menetapkan 3 (tiga) jalur strategi pembangunan, yaitu Pro-Pertumbuhan (*Pro-Growth*) yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi dengan meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah dan meningkatkan kualitas konsumsi, Pro-Lapangan Kerja (*Pro-Job*) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar pengangguran dapat menurun sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, serta Pro-Masyarakat Miskin (*Pro-Poor*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat dengan menyempurnakan sistem perlindungan sosial, meningkatkan pelayanan dasar, dan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Juliansyah (2024) aspek sumber daya manusia adalah yang paling krusial. Kemiskinan bisa diatasi lebih cepat jika terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Sebaliknya jika kualitas SDM rendah, akan memerlukan waktu lama untuk mengangkat orang dari kemiskinan. Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai melalui pendidikan yang terfokus. Aspek pendidikan menjadi indikator dalam meningkatkan kualitas SDM.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bantaeng memberikan bantuan sosial melalui program BLT-P3KE dengan total bantuan sebesar Rp 2.400.000 dan tambahan Rp 200.000 kepada keluarga penerima manfaat. Program ini terbukti efektif dalam mengendalikan angka kemiskinan, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Kab. Bantaeng. Dengan bantuan ini, warga yang terdampak oleh kesulitan ekonomi dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, memperbaiki kualitas hidup, serta meningkatkan daya beli. Secara keseluruhan, BLT-P3KE menjadi salah satu upaya strategis yang berhasil memulihkan perekonomian daerah, membantu masyarakat keluar dari kondisi sulit, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Sosial memiliki tanggung jawab penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pengendalian kemiskinan. Program-program seperti BLT-P3KE (Bantuan Langsung Tunai – Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), bantuan sembako, serta pelatihan keterampilan merupakan bagian dari strategi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Wulandari et al., 2022). Namun demikian, efektivitas program-program tersebut perlu dikaji secara mendalam, mengingat seringkali ditemui permasalahan dalam ketepatan sasaran, kurangnya data yang valid, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi pasca pelaksanaan program (Adi et al., 2023).

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah sangat krusial. Mereka harus memastikan bahwa data penerima bantuan selalu diperbarui dan akurat. Selain itu, perlu ada pelatihan bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan verifikasi data dan evaluasi program.

Secara keseluruhan, program BLT-P3KE memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bantaeng. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan perbaikan dalam hal ketepatan sasaran, validitas data, serta pengawasan dan evaluasi program (Firmansyah & Fanida, 2022). Dengan

demikian, program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa berbagai penelitian sebelumnya telah membahas strategi pengentasan kemiskinan. Misalnya, penelitian oleh (Telaumbanua & Ndraha, 2023) menekankan pentingnya inovasi pelayanan publik berbasis digital sebagai instrumen efisiensi program pemerintah, sedangkan studi oleh (Handayani & Tumija, 2016) menunjukkan bagaimana pemanfaatan sistem informasi dapat meningkatkan akurasi distribusi bantuan sosial. Namun, sebagian besar kajian lebih banyak menyoroti aspek teknis administrasi atau cakupan nasional, sementara konteks lokal di tingkat kabupaten masih jarang diangkat secara mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara spesifik strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. Fokus utamanya adalah untuk memahami bagaimana strategi bantuan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dijalankan, serta menilai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran implementasi program di lapangan, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif berbasis data kualitatif yang secara spesifik melihat interaksi antara strategi kebijakan pemerintah daerah dan respons masyarakat dalam konteks pengendalian kemiskinan di daerah pasca pandemi. Dengan menelaah dinamika lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di masa mendatang.

Berdasarkan pernyataan yang telah dihimpun, melihat potensi pemerintah Kab. Bantaeng yang serius dalam mengendalikan angka kemiskinannya

membuat peneliti tertarik untuk meneliti strategi pemerintah Kab. Bantaeng dalam mengendalikan angka kemiskinan di wilayahnya.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa instansi ini memiliki peran sentral dalam pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan, baik melalui bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Kabupaten Bantaeng memiliki tingkat kemiskinan yang fluktuatif namun tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah, serta telah menjalankan sejumlah strategi yang layak untuk ditelaah lebih lanjut efektivitasnya.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi-strategi pengendalian kemiskinan dari perspektif pelaksana kebijakan maupun masyarakat penerima manfaat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial yang kompleks dan dinamis secara lebih utuh, terutama dalam konteks interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program sosial.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas di kantor Dinas Sosial dan lingkungan masyarakat penerima bantuan untuk melihat langsung proses pelaksanaan program. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan kunci, yaitu pejabat Dinas Sosial yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan kegiatan, data statistik dari BPS, dan dokumen program dari instansi terkait.

Data yang telah terkumpul kemudian diproses melalui tiga tahapan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi yang relevan dipilih dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel ringkasan untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul, yang kemudian diverifikasi secara berulang untuk memastikan validitasnya.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana strategi pengendalian kemiskinan dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendalanya.

3. Hasil Dan Pembahasan

penelitian ini menunjukkan data yang diberikan oleh Dinas Sosial, kondisi kemiskinan di Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan memang cenderung rendah dan terkendali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan jumlah penduduk yang saat ini hanya berkisar sekitar 205.000 jiwa, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantaeng berada dalam kisaran 8-9%, yang berarti sekitar 15.000 hingga 18.000 jiwa termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Meskipun angka kemiskinan relatif rendah, lonjakan angka kemiskinan sempat terjadi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Wabah tersebut mempengaruhi banyak sektor kehidupan, salah satunya adalah penutupan lapangan pekerjaan, serta pembatasan mobilitas yang diterapkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus. Akibatnya, banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan atau tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka.

Namun, pemerintah Kabupaten Bantaeng berhasil menanggulangi peningkatan angka kemiskinan ini dengan cepat, sehingga pada tahun berikutnya, tingkat kemiskinan dapat diturunkan kembali menjadi 8%. Meskipun demikian, Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng mengungkapkan bahwa masih ada faktor-faktor yang membuat sebagian masyarakat tetap terdampak kemiskinan.

Faktor utama yang menyebabkan kemiskinan ini adalah pendapatan yang rendah, yang banyak menyasar kelompok buruh atau pekerja dengan upah minimum. Selain itu, keterbatasan modal usaha, kurangnya keterampilan atau keahlian yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja, serta ketiadaan lahan untuk digarap atau alat kerja menjadi penghambat utama. Pola pikir yang kurang maju dan rendahnya tingkat pendidikan serta kualitas sumber daya manusia (SDM) juga turut menjadi penyebab kemiskinan yang masih terjadi. Selain itu, faktor kesehatan yang buruk, serta tingginya jumlah masyarakat lanjut usia, turut memperburuk keadaan ekonomi sebagian masyarakat.

Dalam upaya menangani kemiskinan ini, Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng memiliki beberapa strategi yang sudah dijalankan yakni pemberian bantuan sosial (Bansos) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan. Meskipun pemberian bansos sudah menjadi hal yang umum di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah Kabupaten Bantaeng memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Dinas Sosial juga memperkuat aspek pendidikan dengan memberikan bantuan-bantuan terkait pendidikan.

Dalam perencanaannya, Dinas Sosial Kab. Bantaeng yang bertanggung jawab dalam pengendalian kemiskinan ini merumuskan program-program yang sekiranya dapat mengendalikan kemiskinan di wilayahnya. Kemudian dalam pengorganisasian mengatur tata kelola mulai dari menyusun struktur hingga menghimpun proses efektivitas kegiatan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Sosial, kondisi kemiskinan di Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan memang cenderung rendah dan terkendali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan jumlah penduduk yang saat ini hanya berkisar sekitar 205.000 jiwa, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantaeng berada dalam kisaran 8-9%, yang berarti sekitar 15.000 hingga 18.000 jiwa termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Meskipun angka kemiskinan

relatif rendah, lonjakan angka kemiskinan sempat terjadi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Wabah tersebut mempengaruhi banyak sektor kehidupan, salah satunya adalah penutupan lapangan pekerjaan, serta pembatasan mobilitas yang diterapkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus. Akibatnya, banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan atau tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka.

Namun, pemerintah Kabupaten Bantaeng berhasil menanggulangi peningkatan angka kemiskinan ini dengan cepat, sehingga pada tahun berikutnya, tingkat kemiskinan dapat diturunkan kembali menjadi 8%. Meskipun demikian, Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng mengungkapkan bahwa masih ada faktor-faktor yang membuat sebagian masyarakat tetap terdampak kemiskinan. Faktor utama yang menyebabkan kemiskinan ini adalah pendapatan yang rendah, yang banyak menysasar kelompok buruh atau pekerja dengan upah minimum. Selain itu, keterbatasan modal usaha, kurangnya keterampilan atau keahlian yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja, serta ketiadaan lahan untuk digarap atau alat kerja menjadi penghambat utama. Pola pikir yang kurang maju dan rendahnya tingkat pendidikan serta kualitas sumber daya manusia (SDM) juga turut menjadi penyebab kemiskinan yang masih terjadi. Selain itu, faktor kesehatan yang buruk, serta tingginya jumlah masyarakat lanjut usia, turut memperburuk keadaan ekonomi sebagian masyarakat.

Dalam upaya menangani kemiskinan ini, Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng memiliki beberapa strategi yang sudah dijalankan yakni pemberian bantuan sosial (Bansos) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan. Meskipun pemberian bansos sudah menjadi hal yang umum di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah Kabupaten Bantaeng memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Dinas Sosial juga memperkuat aspek pendidikan dengan memberikan bantuan-bantuan terkait pendidikan.

Selanjutnya pelaksanaan, berdasarkan penelitian yang dilakukan pelaksanaan program bantuan sosial dan peningkatan aspek pendidikan telah diimplementasikan sejak lama di Dinas Sosial Kab. Bantaeng dimana hasilnya kemiskinan dapat dikendalikan, hal ini juga di perkuat langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat yang menyatakan bahwa bansos dan pelatihan sangat membantu dari berbagai aspek kehidupannya. Kemudian evaluasi dilakukan untuk *me-monitoring* secara langsung program-program yang di jalankan untuk menilai efektivitas program tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian sehingga dapat terus dikembangkan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan (Salsabila et al., 2024) menyatakan program Bantuan Sosial ini bertujuan secara langsung untuk memberikan bantuan pada kelompok masyarakat tertentu seperti dalam kondisi memiliki resiko sosial guna mempermudah perekonomiannya atau mengembangkan potensi yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut. Pemberian bantuan sosial merupakan suatu upaya untuk meringankan penderitaan, melindungi kondisi fisik dan juga sebagai sarana memberdayakan potensi seseorang. Selain untuk membantu kelompok masyarakat yang tergolong miskin, bantuan sosial ini juga diberikan bagi masyarakat yang dianggap memiliki potensi dan ingin mengembangkan potensinya tersebut untuk mencapai kesejahteraan.

Teori ini selaras dengan strategi pemerintah dalam mengendalikan kemiskinan dimana bansos tidak hanya memberikan bantuan semata-mata kepada masyarakat tetapi juga memperhatikan peningkatan SDM nya melalui pendidikan agar nantinya masyarakat tersebut memiliki keahlian dalam suatu bidang agar menunjang perekonomian rumah tangganya dan menciptakan masyarakat mandiri sehingga bansos ini menjadi efektif dan berdampak mengendalikan kemiskinan.

Hal ini juga didukung oleh (Juliansyah et al., 2024) dimana kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat kemiskinan. Keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan akan lebih mudah

dicapai jika sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada Kab. Bantaeng yakni melalui peningkatan aspek pendidikan dengan memberikan bantuan agar anak-anak tidak putus sekolah. Melalui peningkatan pendidikan, masyarakat dapat memperoleh keterampilan tidak hanya intelektual namun juga kemampuan fisik (keterampilan).

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan terdapat penelitian yang mengaitkan program bansos sebagai bagian dari strategi pengendalian kemiskinan di wilayahnya namun terdapat pula penelitian yang tidak menggunakan bansos sebagai strategi pemerintah dalam mengendalikan kemiskinan di daerahnya. Hal ini menandakan bahwa tiap daerah memiliki strategi yang beragam dalam mengendalikan angka kemiskinan di wilayahnya. Kesamaan dari keseluruhan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penekanan peningkatan sumber daya manusianya, artinya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam mengendalikan kemiskinan.

Secara keseluruhan dengan mengaitkan berbagai informasi dan data yang ditemukan, peneliti menyimpulkan bahwa strategi pemerintah dalam mengendalikan angka kemiskinan di Dinas Sosial Kab. Bantaeng melalui strategi pemberian bansos dengan memperhatikan indikator efektifitas dan dampak terhadap perekonomian terbukti efektif dalam mengendalikan kemiskinan, begitu pula strategi peningkatan kualitas sumber daya manusianya melalui aspek pendidikan terbukti dapat mengendalikan angka kemiskinan di Kab. Bantaeng.

Secara teoritis, strategi yang dijalankan dapat dianalisis menggunakan teori POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dalam manajemen publik. Tahapan perencanaan sudah cukup matang dengan adanya basis data yang digunakan untuk menyusun sasaran program. Namun, pada aspek organisasi dan pelaksanaan, ditemukan kendala dalam koordinasi lintas sektor

dan keterbatasan sumber daya manusia. Tahap pengawasan atau controlling juga belum optimal, terbukti dari minimnya evaluasi berkala terhadap efektivitas program yang dijalankan.

Temuan ini juga menunjukkan kesesuaian parsial dengan teori pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pelayanan publik harus bersifat adil, tidak diskriminatif, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Dalam praktiknya, keadilan distribusi bantuan masih belum sepenuhnya tercapai, terutama di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau.

Secara kelembagaan, regulasi dari Kementerian Sosial dan Permendagri terkait data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi pedoman utama. Akan tetapi, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan teknis di lapangan, seperti keterbatasan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam validasi data.

Dari sisi sintesis, pentingnya hasil penelitian ini terletak pada penggabungan antara pendekatan jangka pendek (bantuan sosial) dan jangka panjang (pemberdayaan SDM), yang jika dikelola secara tepat dapat menciptakan siklus pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan (Juliansyah et al., 2024). Sayangnya, kurangnya integrasi antara data, program, dan evaluasi menjadikan strategi yang baik tidak sepenuhnya mencapai potensi maksimalnya.

Dengan demikian, efektivitas strategi pengendalian kemiskinan di Kabupaten Bantaeng masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek monitoring dan akurasi data penerima manfaat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat literatur mengenai implementasi kebijakan sosial berbasis lokal dan menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengendalian kemiskinan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam, diketahui bahwa strategi yang dilaksanakan mencerminkan upaya sistematis pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui kombinasi intervensi bantuan langsung dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan strategi tersebut memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi yang signifikan apabila dijalankan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang masih terbatas pada satu instansi dan lokasi, serta jumlah informan yang relatif sedikit. Hal ini menyebabkan generalisasi temuan belum dapat diterapkan secara menyeluruh pada konteks kabupaten lainnya. Selain itu, keterbatasan dalam dokumentasi tertulis dan akses terhadap data real-time juga menjadi tantangan tersendiri dalam menguatkan analisis empiris secara kuantitatif.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan akurasi data penerima manfaat, memperluas jangkauan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, kolaborasi antarinstansi dan partisipasi aktif masyarakat perlu ditingkatkan dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Referensi/References

- Adi, M., Putra, P., Putra, A. P., Dirli, A. A., Andriani, W., & Mauldyraharja, R. (2023). Menggali Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dalam Membantu Masyarakat. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 189–205.
- Fery Priawan, & Ichsan Iqbal. (2024). Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam. *Holistik Analisis Nexus*, 1(7), 231–239. <https://doi.org/10.62504/nexus804>
- Firmansyah, W. I., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Kepada Masyarakat Terdampak

- Covid-19 Di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. *Publika*, 261–272. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p261-272>
- Handayani, N., & Tumija, T. (2016). Strategi Pengendalian Kemiskinan Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 37. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.149>
- Juliansyah, J., Khoffifah, K., Khoiriyah, K., & Daryono, D. (2024). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2642–2654. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i7.1271>
- Mulia, R. A., & Putri, R. P. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 22–33. <https://doi.org/10.69989/68ye6x37>
- Pratama, I. N. (2023). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>
- Telaumbanua, F., & Ndraha, A. B. (2023). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif Ekologi Manajemen Di Kabupaten Nias. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 1631–1644. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.51798>
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Selfia Rachmalija. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April), 3209–3218.